



---

## **ANALISIS MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024**

Dony Kurniawan<sup>1</sup>, Harianto<sup>2</sup>, Bambang Martin Baru<sup>3</sup>, Asrifia Ridwan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Merdeka Madiun

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima: 25 Mei 2026  
Disetujui: 4 Juni 2026  
Dipublikasikan: 5 Juni 2026

**Kata Kunci:**  
money politik,  
pemilihan kepala daerah, perilaku pemilih, demokrasi lokal, Kabupaten Magetan

---

### **Abstrak**

Money politik masih menjadi salah satu problem utama dalam penyelenggaraan demokrasi lokal, terutama dalam pemilihan kepala daerah, karena merusak keadilan elektoral dan berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk praktik money politik, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculannya, serta dampaknya terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024. Objek penelitian adalah praktik money politik yang berlangsung pada tahapan pemilu di Kabupaten Magetan, dengan fokus pada interaksi antara kandidat, tim sukses, dan pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor dan sumber data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik money politik dalam pemilihan terjadi melalui pemberian uang tunai, pembagian sembako, janji bantuan atau proyek, serta pembiayaan kegiatan kampanye secara terselubung kepada pemilih. Praktik tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, rendahnya pendidikan politik, budaya politik yang permisif, relasi patron-klien, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa money politik tidak hanya menjadi pelanggaran elektoral, tetapi juga memengaruhi orientasi pilihan masyarakat menjadi lebih pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, peningkatan efektivitas pengawasan pemilu, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong proses demokrasi lokal yang lebih berkualitas.

---

## **ANALYSIS OF MONEY POLITICS IN THE 2024 REGENT AND VICE REGENT ELECTION OF MAGETAN REGENCY**

**Keywords:**  
money politics,  
regional head elections, voter behavior, local democracy, Magetan Regency

---

### **Abstract**

*Money politics remains a major problem in the implementation of local democracy, particularly in regional head elections, as it undermines electoral fairness and has the potential to reduce the quality of elected leadership. This study aims to analyze the forms of money politics practices, the factors influencing their emergence, and their impact on voter behavior in the 2024 Magetan Regency Regent and Deputy Regent Election. The object of the study is the practice of money politics that occurred during the election stages in Magetan Regency, with a focus on interactions between candidates, campaign teams, and voters. The study used a qualitative approach with*

---

*descriptive methods, through in-depth interviews, field observations, and documentation studies of relevant actors and data sources. The results show that money politics practices in elections occur through cash payments, distribution of basic necessities, promises of assistance or projects, and covert financing of campaign activities to voters. These practices are influenced by the community's weak economic conditions, low political education, a permissive political culture, patron-client relationships, and suboptimal oversight and law enforcement. These findings indicate that money politics is not only an electoral violation but also influences the community's choice orientation to become more pragmatic. Therefore, it is necessary to strengthen political education, increase the effectiveness of election supervision, and enforce the law consistently to encourage a higher quality local democratic process.*

---

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

[donykurniawan399@gmail.com](mailto:donykurniawan399@gmail.com), [hariato@unmer-madiun.ac.id](mailto:hariato@unmer-madiun.ac.id),  
[bambangmartinbaru@unmer-madiun.ac.id](mailto:bambangmartinbaru@unmer-madiun.ac.id), [asrifiaridwan@unmer-madiun.ac.id](mailto:asrifiaridwan@unmer-madiun.ac.id).

## PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah sebagai sarana partisipasi warga dalam memilih pemimpin lokal. Secara ideal, pemilihan kepala daerah harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan kampanye sebagai ruang penyampaian gagasan, visi, misi, dan program kerja kandidat. Namun, dalam praktiknya, persaingan politik yang semakin ketat sering diiringi praktik *Money Politics* yang mendorong pemilih menentukan pilihan berdasarkan imbalan materi, bukan kualitas dan integritas calon. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas demokrasi lokal, melemahkan legitimasi hasil pemilihan, serta memperkuat relasi patron klien antara pemimpin terpilih dan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah berisiko bergeser dari sarana kedaulatan rakyat menjadi ruang transaksi politik yang mengancam akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Money Politics* telah mengakar dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Padilah and Irwansyah (2023) menegaskan bahwa praktik ini mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu. Nabila et al. (2020) menemukan bahwa *Money Politics* menggeser dukungan substantif pemilih menjadi berbasis kemampuan finansial kandidat. Rahyu et al. (2025) menunjukkan bahwa pemberian uang tunai oleh calon maupun tim sukses digunakan untuk mengamankan suara. Secara konseptual, *Money Politics* mencakup pembelian suara, pembagian sembako, janji proyek, dan bantuan sosial bermuatan politik (Ramli M, 2016). Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori patronase politik, ekonomi politik,

pertukaran sosial, pilihan rasional, dan budaya politik (Howard and Mulholland, Jeremy, 2016). Namun, kajian tentang dinamika *Money Politics* dalam pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten tertentu masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan kajian pustaka, kebaruan artikel ini terletak pada fokus kajian *Money Politics* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 dengan menekankan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang banyak membahas pemilu legislatif atau daerah lain, penelitian ini menyoroti Pilkada di kabupaten agraris dengan kondisi ekonomi terbatas dan struktur sosial heterogen. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik *Money Politics*, tetapi juga memetakan bentuk, aktor, serta kaitannya dengan relasi patron–klien lokal. Selain itu, penggunaan teori patronase politik, ekonomi politik, pertukaran sosial, pilihan rasional, dan budaya politik memberi sudut pandang yang lebih luas dalam membaca perilaku pemilih dalam tekanan ekonomi dan budaya politik permisif (Julia Cagé, 2018).

Permasalahan penelitian ini berawal dari kondisi Kabupaten Magetan yang rentan terhadap *Money Politics*. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan keterbatasan ekonomi, sementara pemberian uang atau barang menjelang pemilihan masih sering dianggap wajar. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan pertukaran materi dan suara, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bentuk-bentuk *Money Politics*, faktor pendorongnya, serta pengaruhnya terhadap perilaku pemilih dan kualitas demokrasi lokal.

Pada teori patronase politik, *Money Politics* dipahami sebagai distribusi sumber daya dari patron kepada klien untuk memperoleh dukungan politik (Ichsan, 2016). Teori ekonomi politik melihat praktik ini sebagai bagian dari kepentingan ekonomi dan perebutan sumber daya kekuasaan (Smith; Marx in the economic politics tradition). Teori pertukaran sosial memandang *Money Politics* sebagai hubungan timbal balik antara kandidat dan pemilih untuk memperoleh keuntungan (Julia Cagé, 2018). Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa pemilih rentan dapat menerima imbalan materi karena dianggap memberi manfaat langsung (Howard and Mulholland, Jeremy, 2016). Sementara itu, teori budaya politik menunjukkan bahwa budaya parokial atau kaula membuat *Money Politics* lebih mudah diterima sebagai kebiasaan politik (Jeffrey A. Winters, 2016).

Berdasarkan latar belakang, kajian literatur, dan kerangka teori tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis *Money Politics* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024. Fokus penelitian mencakup bentuk praktik, faktor pendorong, serta implikasinya terhadap perilaku pemilih, relasi patron–klien, dan kualitas demokrasi lokal. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik dan ilmu politik tentang demokrasi lokal. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mencegah *Money Politics* serta memperkuat partisipasi politik yang rasional dan berintegritas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik *Money Politics* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan interaksi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi angka, sementara studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena *Money Politics* dalam konteks sosial-politik Magetan secara utuh dan mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan pertimbangan adanya indikasi kuat praktik *Money Politics* pada Pilkada 2024, keragaman sosial masyarakat, serta kemudahan akses peneliti terhadap aktor-aktor lokal. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk-bentuk praktik *Money Politics* dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, yang dirumuskan berdasarkan teori dan temuan terdahulu, terutama kategori bentuk dan faktor pendorong *Money Politics* yang dikemukakan Ramli (2016). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap masyarakat pemilih, tim sukses pasangan calon, Ketua Dusun, dan pihak Bawaslu yang dipilih dengan teknik purposive sampling karena dinilai paling memahami dan terlibat langsung dalam praktik *Money Politics*. Data sekunder dihimpun dari dokumen resmi KPU dan Bawaslu, pemberitaan media massa, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan penyelenggaraan Pilkada Magetan 2024. Kombinasi lokasi, fokus, dan pemilihan informan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi bentuk praktik *Money Politics* dan menganalisis faktor pendorongnya secara kontekstual di tingkat kabupaten.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi yang disusun secara terpadu

mengikuti prosedur penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mencermati langsung situasi sosial, pola interaksi, dan praktik kampanye yang berkaitan dengan *Money Politics* di lapangan, sementara wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian informan mengenai bentuk dan faktor pendorong *Money Politics* dalam Pilkada Magetan 2024 (Sugiyono, 2018). Wawancara ini dilakukan pada beberapa informan diantaranya Agnes, Cahyawati, Sutomo, Ali, Edi, Didik, Muhammad Kilat serta disusun dengan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel, sehingga peneliti dapat menyesuaikan alur percakapan dengan respons informan tanpa keluar dari fokus penelitian. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, arsip, dan berita yang mendukung pemahaman terhadap dinamika *Money Politics* di Magetan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ardi, 2023). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk mengorganisasi temuan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, dan implikasi praktik *Money Politics* terhadap perilaku pemilih dan kualitas demokrasi lokal. Dengan cara, teknik, dan prosedur tersebut, metode penelitian ini dirancang untuk secara efektif memecahkan permasalahan yang dirumuskan dan mencapai tujuan kajian artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian uang tunai langsung kepada pemilih**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang tunai langsung kepada pemilih merupakan bentuk praktik *Money Politics* yang paling dominan dalam Pilkada Magetan 2024. Masyarakat pemilih seperti Agnes, Cahyawati, Sutomo, Ali, Edi, Didik mengaku pernah menerima uang tunai menjelang hari pemilihan, baik diserahkan langsung maupun melalui perantara seperti tetangga, pemilik toko, dan penjaga warung di lingkungan mereka. Penyerahan uang biasanya dilakukan pada malam hari atau dalam situasi sehari-hari yang tampak wajar untuk menghindari kecurigaan dan pengawasan aparat, serta sering disertai ajakan atau pesan agar memilih calon tertentu. Dari keterangan tim sukses, terdapat perbedaan narasi: sebagian menyatakan tidak ada strategi resmi pembagian uang dan menganggapnya sebagai inisiatif oknum, sementara yang lain mengakui adanya pembahasan informal di

lingkungan tim mengenai pemberian uang sebagai “strategi lapangan”. Kepala dusun menyatakan mengetahui adanya penyaluran uang melalui orang-orang kepercayaan di dusun, tetapi tidak pernah ada pelaporan resmi ke lembaga pengawas. Pihak Bawaslu diwakili oleh kepala Bawaslu, Muhammad Kilat mengonfirmasi bahwa selama Pilkada tidak ada laporan formal terkait pemberian uang tunai, meskipun informasi dari masyarakat menunjukkan praktik ini terjadi di bawah permukaan. Kombinasi pengakuan penerima, pengakuan sebagian tim sukses, dan ketiadaan laporan resmi menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik nyata di lapangan dengan mekanisme pengawasan formal yang bergantung pada laporan tertulis.

Temuan mengenai pemberian uang tunai ini dapat dibaca melalui teori patronase politik, teori ekonomi politik, pertukaran sosial, dan pilihan rasional. Dalam perspektif patronase, pemberian uang tunai adalah bentuk distribusi sumber daya oleh patron (kandidat atau tim sukses) kepada klien (pemilih) untuk memperoleh dukungan politik sebagai balas jasa, sehingga relasi politik direduksi menjadi hubungan timbal balik berbasis transaksi pribadi (Ichsan, 2016). Teori ekonomi politik menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Magetan yang banyak bergantung pada sektor informal dan pertanian membuat uang tunai menjadi insentif yang sangat bermakna, sehingga warga melihat penerimaan uang bukan semata sebagai pelanggaran, tetapi sebagai cara bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa pemberian uang menumbuhkan rasa utang budi dan kewajiban moral yang mendorong penerima untuk membalas dengan dukungan suara, karena interaksi sosial dipahami sebagai pertukaran manfaat yang saling menguntungkan (Jeffrey A. Winters, 2016). Sementara itu, teori pilihan rasional menunjukkan bahwa pemilih melakukan kalkulasi pragmatis dengan mempertimbangkan manfaat langsung yang diperoleh dari uang tunai, sehingga dukungan kepada kandidat dianggap sebagai keputusan rasional dalam situasi di mana kebutuhan ekonomi mendesak dan program jangka panjang tampak abstrak (Julia Cagé). Budaya politik yang cenderung permisif terhadap praktik seperti ini memperkuat penerimaan sosial terhadap *Money Politics*, karena banyak warga memandang pemberian uang menjelang pemilu sebagai hal biasa, bukan ancaman bagi demokrasi (Jeffrey A. Winters, 2016).

### **Pembagian barang atau sembako**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembagian barang atau sembako menjadi salah satu bentuk praktik *Money Politics* yang cukup menonjol dalam Pilkada Magetan 2024. Agnes mengaku pernah menerima sembako yang dibagikan langsung dari rumah ke rumah oleh perwakilan tim salah satu calon. Cahayawati tidak menerima

sembako secara langsung, tetapi mengetahui adanya pembagian sembako di lingkungan sekitarnya. Pak Sutomo juga menyampaikan bahwa ia pernah melihat pembagian beras dan minyak goreng, disertai pesan tidak langsung agar masyarakat mengingat calon tertentu. Dari sisi tim sukses, Pak Ali mengakui adanya kegiatan pembagian sembako yang dikemas sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekaligus memperkenalkan pasangan calon, sedangkan Pak Edi menyebut pembagian sembako dilakukan secara langsung atau melalui tokoh setempat agar warga merasa diperhatikan dan cenderung memilih kandidat. Pak Didik selaku kepala dusun juga menjelaskan bahwa pembagian sembako dilakukan melalui mekanisme langsung atau titipan kepada tokoh lokal dengan tujuan memengaruhi kecenderungan pilihan warga. Sementara itu, Pak Kilat dari Kepala Bawaslu Kabupaten Magetan mengonfirmasi bahwa terdapat laporan dugaan pembagian sembako yang telah diproses dan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian sembako tidak hanya dipahami sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi strategi elektoral yang berpotensi memengaruhi perilaku memilih masyarakat secara tidak langsung.

Dalam kerangka patronase politik, pola ini dapat dipahami sebagai distribusi manfaat material dari kandidat atau tim sukses kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan politik sebagai balas jasa, sedangkan teori ekonomi politik menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi lokal yang didominasi kelompok menengah ke bawah, sembako memiliki nilai strategis karena menjawab kebutuhan dasar pemilih, sehingga menjadi instrumen efektif untuk memengaruhi preferensi politik (Ramli, 2016). Teori pertukaran sosial membantu menerangkan mengapa penerima sembako kerap merasa sungkan dan memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan tersebut melalui dukungan suara, sementara teori budaya politik menunjukkan bahwa pengulangan praktik ini pada setiap pemilu menjadikannya tampak sebagai tradisi yang wajar, bukan penyimpangan dari prinsip keadilan pemilu, sehingga pembagian sembako beroperasi sebagai bentuk *Money Politics* yang memanfaatkan sekaligus mereproduksi kerentanan ekonomi dan norma balas budi di tingkat lokal (Jeffrey A. Winters, 2016).

### **Janji pemberian fasilitas atau proyek pembangunan**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa janji pemberian fasilitas atau proyek pembangunan muncul dalam Pilkada Magetan 2024 melalui penyampaian rencana perbaikan jalan, bantuan infrastruktur desa, dan pembangunan fasilitas umum. Agnes, Pak Sutomo, Pak Ali, Pak Edi, dan Pak Didik sama-sama menunjukkan bahwa isu

pembangunan fasilitas disampaikan dalam pertemuan warga, kampanye kecil, atau melalui tokoh desa, meskipun sebagian informan membedakannya sebagai program kampanye, sedangkan yang lain melihatnya sebagai pendekatan untuk mengarahkan dukungan warga. Cahyawati tidak menerima janji pembangunan secara langsung dari kandidat maupun timnya. Sementara itu, Pak Kilat dari Kepala Bawaslu Kabupaten Magetan menyatakan tidak ada laporan atau temuan resmi terkait janji pemberian fasilitas atau proyek pembangunan selama Pilkada.

Dari sudut pandang teori, janji fasilitas atau proyek pembangunan dapat dikategorikan sebagai bentuk patronase non-material yang menjanjikan manfaat kolektif di masa depan sebagai imbalan dukungan politik. Dalam kerangka patronase politik, janji proyek kepada desa atau kelompok tertentu merupakan strategi untuk mengikat dukungan dalam jangka menengah melalui komitmen pembangunan yang diarahkan secara selektif kepada basis pemilih potensial (Jeffrey A. Winters, 2016). Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa pemilih mempertimbangkan potensi manfaat yang akan diterima jika kandidat yang menjanjikan proyek terpilih, sehingga mereka cenderung memilih calon yang menawarkan keuntungan konkret bagi komunitas mereka, walaupun pelaksanaan janji tersebut belum tentu pasti. Teori ekonomi politik juga relevan, karena janji pembangunan seringkali diarahkan ke wilayah yang merasakan ketimpangan pembangunan, sehingga proyek dijadikan instrumen untuk mengatasi ketidakpuasan sekaligus mengamankan dukungan politik. Dalam konteks budaya politik lokal, janji pembangunan kadang dipandang sebagai bagian wajar dari kampanye sehingga tidak segera dikenali sebagai bentuk *Money Politics* terselubung, terutama ketika tidak disertai syarat dukungan secara eksplisit (Julia Cagé, 2018). Dengan demikian, janji fasilitas dan proyek pembangunan menjadi bentuk politik transaksional yang lebih halus, tetapi tetap berpotensi mengancam integritas demokrasi ketika dipakai sebagai alat barter dukungan.



**Gambar 1** Perkumpulan masyarakat dengan tim sukses janji pemberian fasilitas proyek atau proyek pembangunan

*Sumber : Peneliti, 6 Maret 2025*

### **Pemberian bantuan sosial atau donasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial atau donasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan muncul dalam Pilkada Magetan 2024, meskipun tidak semua informan mengalaminya secara langsung. Agnes menyatakan tidak pernah melihat bantuan berupa sembako dalam kegiatan keagamaan menjelang pemilihan, sedangkan Cahyawati, Pak Sutomo, Pak Ali, Pak Edi, dan Pak Didik sama-sama menunjukkan bahwa bantuan sosial atau donasi pernah disalurkan melalui kegiatan sosial, keagamaan, panitia acara, atau tokoh masyarakat setempat. Dalam beberapa keterangan, bantuan tersebut tidak disertai ajakan memilih secara terbuka, tetapi nama kandidat tetap disebut atau dikaitkan dengan bantuan yang diberikan. Pak Ali menyebut bantuan tersebut bertujuan membangun kedekatan dengan masyarakat, sementara Pak Edi dan Pak Didik menjelaskan bahwa penyalurannya dilakukan mendekati pemilihan untuk menarik simpati. Sementara itu, Pak Kilat dari Bawaslu Kabupaten Magetan menyatakan tidak ada laporan resmi terkait penyalahgunaan bantuan sosial atau donasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan selama Pilkada, meskipun Bawaslu tetap mengingatkan agar kegiatan keagamaan dan fasilitas ibadah tidak digunakan sebagai arena kampanye.

Dalam perspektif teori pertukaran sosial, bantuan sosial dan donasi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan membentuk relasi timbal balik antara pemberi dan penerima yang ditandai oleh rasa terima kasih, utang budi, dan kewajiban moral untuk membalas kebaikan (Julia Cagé, 2018). Ketika pemberi bantuan adalah kandidat atau

tim sukses, kewajiban moral tersebut dengan mudah diterjemahkan menjadi dukungan politik, terutama jika bantuan diberikan menjelang pemilihan sehingga asosiasi antara bantuan dan pemilu masih sangat kuat. Teori budaya politik menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat dengan budaya parokial atau kaula, praktik pemberian bantuan menjelang pemilihan sering kali dianggap sebagai bagian wajar dari kegiatan sosial, bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan keadilan pemilu (Julia Cagé, 2018). Di sisi lain, teori ekonomi politik dan pilihan rasional menunjukkan bahwa bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, bantuan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kandidat, karena memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan, sehingga memengaruhi orientasi pilihan politik mereka. Dengan demikian, pemberian bantuan sosial dan donasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat dipahami sebagai bentuk *Money Politics* terselubung yang memanfaatkan norma balas budi dan keterbatasan ekonomi, sehingga berpotensi menggeser perilaku memilih dari basis rasional ke basis transaksional.



**Gambar 2** Salah satu Calon Bupati dan wakil Bupati Magetan menjanjikan pengembangan UMKM Budidaya ikan lele

Sumber : Pewarta TV Official, 23 September 2024

### **Pembiayaan kegiatan kampanye terselubung**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan kampanye terselubung muncul dalam Pilkada Magetan 2024 melalui bantuan dana, fasilitas, atau dukungan kegiatan warga. Agnes, Cahyawati, dan Pak Sutomo sama-sama menyebut adanya bantuan untuk kegiatan desa, pertemuan warga, atau acara sosial yang disalurkan melalui ketua RT, panitia, atau tokoh masyarakat setempat. Pak Ali, Pak Edi, dan Pak Didik menjelaskan bahwa kampanye tidak resmi dilakukan melalui pertemuan kecil, kegiatan sosial, kunjungan ke rumah warga, atau pemberian bantuan

yang pembiayaannya berasal dari iuran tim, kas tim, relawan, maupun sumbangan simpatisan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak selalu disebut sebagai kampanye secara terbuka, tetapi tetap memuat kepentingan untuk membangun dukungan politik. Sementara itu, Pak Kilat dari Bawaslu Kabupaten Magetan menyatakan tidak ada laporan atau temuan resmi terkait kampanye terselubung maupun pembiayaan yang tidak sesuai regulasi selama Pilkada.

Menurut perspektif patronase politik, pembiayaan kegiatan kampanye terselubung merupakan bentuk distribusi sumber daya yang lebih terstruktur, di mana kandidat dan tim sukses menggunakan kegiatan sosial sebagai kendaraan untuk membangun jaringan dukungan politik melalui pemberian manfaat kolektif yang tidak dicatat dalam laporan resmi (Jeffrey A. Winters, 2016). Teori ekonomi politik menyoroti bahwa kandidat dengan sumber daya finansial yang besar memiliki keunggulan dalam membiayai kegiatan semacam ini, sehingga menciptakan ketimpangan kompetisi dan melemahkan prinsip kesetaraan kesempatan antar peserta pemilu. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa warga yang menghadiri kegiatan yang dibiayai tim kandidat cenderung merasa terikat secara sosial dan moral, karena mereka menikmati manfaat dari acara tersebut dan melihat kandidat sebagai pihak yang peduli terhadap kebutuhan komunitas mereka (Jeffrey A. Winters, 2016). Sementara itu, teori budaya politik membantu memahami mengapa banyak warga memandang kegiatan ini sebagai hal biasa, karena budaya politik lokal belum sepenuhnya menempatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye sebagai nilai utama (Howard and Mulholland, Jeremy, 2016). Dalam kombinasi ini, pembiayaan kampanye terselubung menjadi bentuk *Money Politics* yang sangat sulit diawasi, tetapi berdampak besar terhadap keadilan dan transparansi pemilu, karena dukungan politik dibangun melalui jaringan kegiatan yang tidak tercatat secara resmi.

## **PENUTUP (DITULIS TANPA PENOMORAN)**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Money Politics* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 berlangsung melalui lima pola utama yang saling terkait, yaitu pemberian uang tunai, pembagian sembako, janji fasilitas atau proyek pembangunan, pemberian bantuan sosial dalam kegiatan sosial-keagamaan, serta pembiayaan kampanye terselubung, yang seluruhnya beroperasi melalui jaringan perantara lokal dan sering kali tidak tercatat dalam mekanisme pengawasan formal. Kelima bentuk tersebut mencerminkan kuatnya logika patronase dan pertukaran material dalam relasi antara kandidat, tim sukses, dan pemilih, di mana dukungan

politik dibangun bukan pada evaluasi program dan integritas, melainkan pada manfaat langsung yang dijanjikan atau diberikan menjelang pemilihan. Di sisi lain, faktor pendorongnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara kesulitan ekonomi masyarakat, rendahnya literasi dan kesadaran politik, budaya politik yang permisif terhadap praktik transaksional, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Secara substantif, temuan ini menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian dengan menegaskan bahwa *Money Politics* di Magetan masih bersifat sistemik dan terencana, serta berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi lokal, melemahkan legitimasi pemimpin terpilih, dan menghambat terbentuknya partisipasi politik warga yang rasional dan berintegritas.

#### Saran / Implikasi Penelitian

Secara teknis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan desain pengawasan dan intervensi kebijakan yang lebih spesifik pada titik-titik rawan praktik *Money Politics* di tingkat lokal, misalnya melalui pengembangan mekanisme pemantauan berbasis komunitas di level RT/RW yang terhubung dengan sistem pelaporan cepat, pelacakan dan audit digital terhadap aliran dana kampanye dan kegiatan sosial-kemasyarakatan menjelang pemilihan, serta dokumentasi sistematis janji-janji pembangunan yang disampaikan kandidat untuk kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan dan evaluasi kinerja kepala daerah. Di ranah teknis pendidikan politik, temuan mengenai peran tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga keagamaan sebagai perantara menunjukkan bahwa program sosialisasi dan peningkatan kapasitas sebaiknya difokuskan pada aktor-aktor lokal ini, bukan hanya pada pemilih individu, sehingga terjadi perubahan praktik di simpul-simpul distribusi manfaat politik. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu—baik dari sisi sumber daya manusia, instrumen pemantauan, maupun protokol penindakan—perlu diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi dan membuktikan bentuk-bentuk *Money Politics* nonkonvensional, seperti janji proyek dan kampanye terselubung, yang selama ini berada di area abu-abu regulasi. Implikasi lain yang bersifat operasional adalah perlunya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi untuk merancang program pemberdayaan ekonomi dan literasi politik yang berkelanjutan, sehingga ketergantungan pemilih pada insentif jangka pendek dapat dikurangi melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan kemampuan kritis warga dalam menilai kandidat dan program mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardi, B. S. A., & Hidayah, N. (2023). Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 16–31. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59265>
- Coleman. (2016). Teori Pilihan Rasional James S. Coleman Dan Teori Kebutuhan Prestasi David McClelland. *Jurnal Ilmiah*, 43–55.
- Dewi, R. P. (2019). *Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif*. April 2015, 31–46. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Encyclopedia. (2019). Faktor Money Politic. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Firmanzah, Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017)
- Cüneyit Akar, Mehmet Kara. (2020). Critical Thinking Attitude and Some Other Variables in Predicting Students' Democratic Attitudes. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 7(2), 226-245.
- Ilona Magda Dwi, P., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Politics And Traditions: Money Politics In Village Head Selection Maurelia Vidiara Auliavia 4 4 , Sinta Nuriyah 5 5 , Agus Mahfud Fauzi 6<sup>6</sup>. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989)
- Teguh Ilham. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).
- Howard and Mulholland, Jeremy (2016). The Politics of Corruption in Indonesia, *Georgetown Journal of International Affairs* 17(1): 43-49
- Julia Cagé. *The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What to Do about It* (Cambridge: Harvard University Press, 2018)
- Jeffrey A. Winters (2016) Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 405-409, DOI: 10.1080/00074918.2016.1236653
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2018)
- Ramli, M. (2016). Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal ( Analisis Terhadap Terpilihnya Hj . Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ). *Skripsi, Fakultas U*(Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar), 1–88.
- Setyoningsih, Y., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Kemampuan Keajaiban dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(1), 1–14.
- Sulaiman, A. (2017). "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 245–260.